



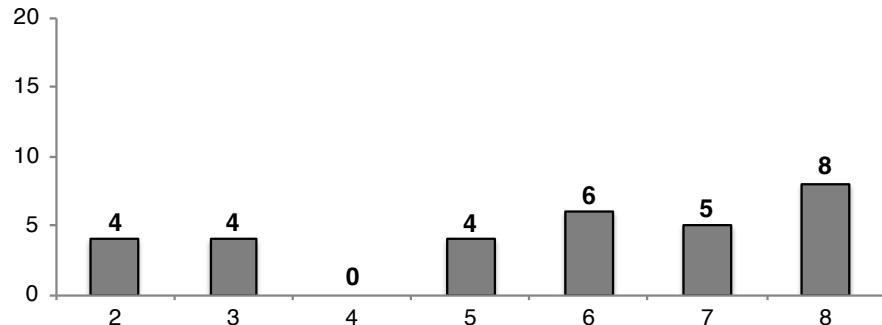
LAPORAN MEDIA CETAK

**Gubernur Jawa Tengah
(08 Mei 2025)**

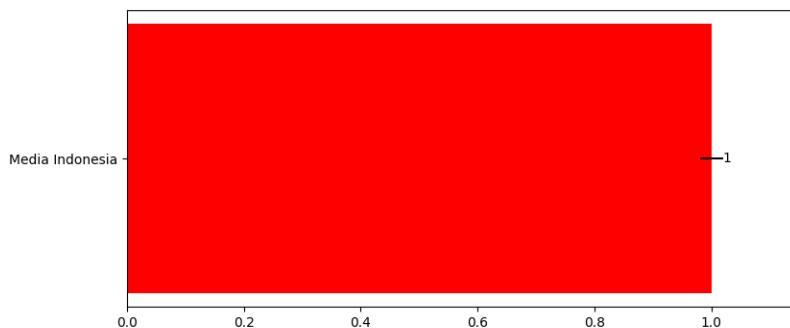
Summary

Media	News	Positive	Neutral	Negative
3	8	8	0	0

Daily Statistic



Media Share



Influencers

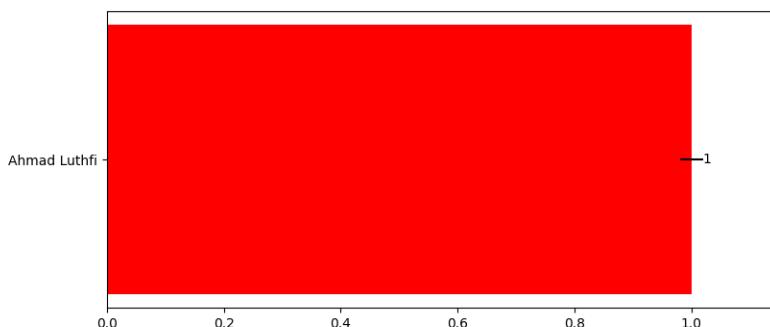
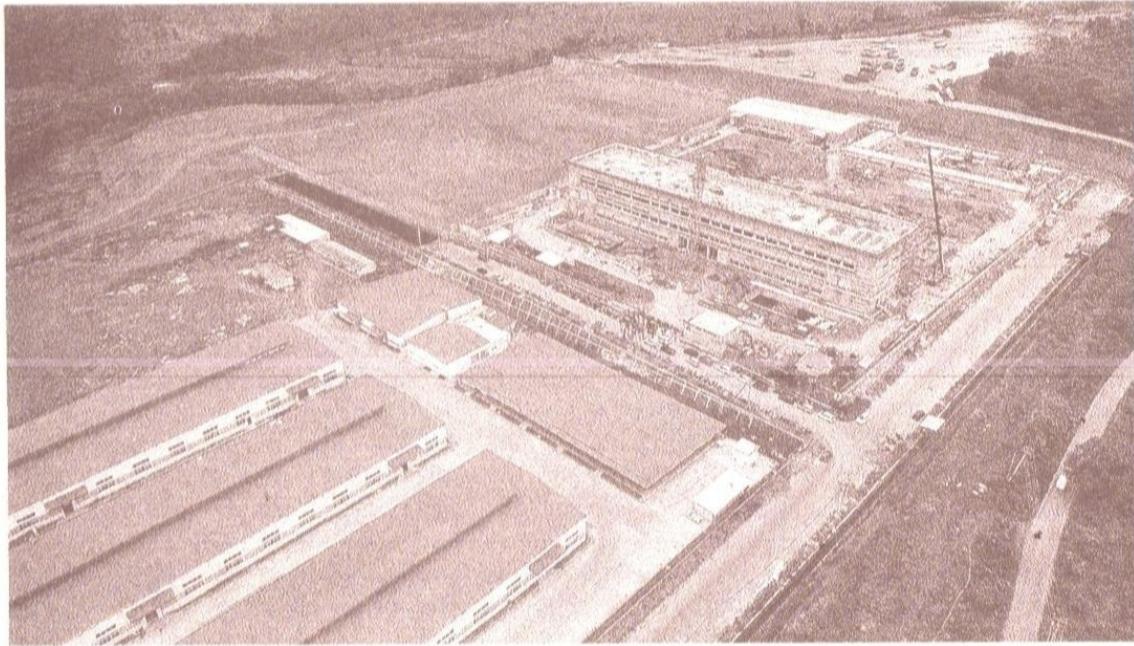


Table Of Contents : 08 Mei 2025

No	Date	Media	News Title	Page	Sentiment	Influencers
1	08 Mei 2025	Media Indonesia	INVESTASI TRIWULAN 2025	11	Positive	Ahmad Luthfi
2	08 Mei 2025	Suara Merdeka	Gubernur Lantik 29 Pejabat Tinggi Pertama	1	Positive	Ahmad Luthfi
3	08 Mei 2025	Jateng Pos	Gubernur: Jabatan, No Titip No Jastip!	12	Positive	Ahmad Luthfi
4	08 Mei 2025	Suara Merdeka	38 Bhikkhu Thudong Mampir Ke Kantor Gubernur	9	Positive	Ahmad Luthfi
5	08 Mei 2025	Jateng Pos	Bhikku Thudong Bawa Misi Toleransi Umat	1	Positive	Ahmad Luthfi
6	08 Mei 2025	Suara Merdeka	Tutup Semua Lubang Pungutan di SMA/SMK	4	Positive	Ahmad Luthfi
7	08 Mei 2025	Suara Merdeka	Lawan dan Sikat Habis Praktik Premanisme	4	Positive	Ahmad Luthfi
8	08 Mei 2025	Jateng Pos	Perlu Dikaji, Usulan Pembentukan Provinsi Jawa Selatan	7	Positive	Ahmad Luthfi

Title	INVESTASI TRIWULAN 2025		
Media	Media Indonesia	Reporter	
Date	2025-05-08	Tone	Positive
Page	11	PR Value	



ANTARA/HARVIYAN PERDANA PUTRA

INVESTASI TRIWULAN I 2025: Foto udara suasana kawasan industri di Batang Industrial Park, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, kemarin. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut investasi yang masuk di Jawa Tengah pada triwulan I 2025 mencapai Rp21,848 triliun, dengan 20.431 proyek yang menyerap tenaga kerja sebanyak 97.550 orang.

Title	Gubernur Lantik 29 Pejabat Tinggi Pertama		
Media	Suara Merdeka	Reporter	ekd-34
Date	2025-05-08	Tone	Positive
Page	1	PR Value	

SARWANUZ KURNIA



SM/Elo Edi

LANTIK PEJABAT: Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi melantik pejabat tinggi pratama lingkungan Pemprov Jateng di Gradhika Bhakti Praja, Rabu, (7/5). (70)

Gubernur Lantik 29 Pejabat Tinggi Pratama

■ Tegaskan No Titip-Titip No Jastip

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melantik 29 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Gubernur menegaskan, jabatan adalah amanah yang diberikan diri sendiri sehingga tidak ada istilah "No Titip-Tip No Jastip" atau diperjualbelikan.

(Bersambung hlm 2 kol 1)

Gubernur...

(Sambungan hlm 1)

"No titip-titip, no jastip. Jadi slogan itu tidak hanya untuk adik-adik SMA (pada penerimaan siswa baru), tapi juga semua jabatan éno titip-titip no jastip. Jelas semua," kata Ahmad Luthfi saat membuka sambutan dan arahan dalam pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Jateng di Gradhika Bhakti Praja, Rabu, (7/5).

Ia menjelaskan, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Jateng sudah dilakukan dengan sistem merit, yaitu berdasarkan kompetensi, rekam jejak, dan lainnya sehingga tidak ada jabatan yang diperjualbelikan.

"Karena kita sistemnya merit maka éno titip titip no jastip. Ora oleh titip ora oleh

jasa penitip, ora oleh bayar, ora ditip, ora usah kask-kusuk dan tidak diperjualbelikan karena jabatan itu amanah," jelasnya.

Lebih lanjut, pelantikan pimpinan tinggi pratama tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan beberapa jabatan kepala dinas dan mutasi beberapa orang. Tujuannya akelerasi kepegawaian dan menyehatkan organisasi.

"Di tempat kita tidak perlu ada seleksi, kita cukup dengan menggunakan management talent, di mana rule nya dengan cara sistem merit," kata Ahmad Luthfi.

Secara umum terkait belanja kepegawaian di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah berjalan bagus dan sesuai dengan aturan. Di mana batas yang ditentukan maksimal 30% telah terpenuhi, artinya sudah sangat profesional.

"Hari ini saya yakin dan percaya dengan jabatan baru yang diambil oleh para pimpinan tinggi pratama itu nanti akan

menambah akselerasi pelayanan publik di tempat kita," jelas Gubernur.

Adapun dalam acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen dan Sekda Jateng Sumarno. Juga untuk pertama kalinya dalam pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama dihadiri oleh Ketua Forum Anak Jawa Tengah, Ketua Kontak Tanu Nelayan Provinsi Jawa Tengah, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Komunitas Sahabat Difabel, dan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Tengah.

Para pejabat yang dilantik antara lain Iwanuddin Iskandar diangkat menjadi Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat, Dhoni Widianto diangkat menjadi Asisten Administrasi (sebelumnya Inspektur Provinsi Jawa Tengah), Yasip Khasani diangkat menjadi Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja

Sama Setda Jateng, Haerudin diangkat menjadi Kepala Biro Hukum, dan Hanung Cahyo Saputo diangkat menjadi Kepala Biro Organisasi Setda Jateng.

Adapun Uswatun Hasanah diangkat menjadi Kepala BPSPMD Provinsi Jawa Tengah, Sadimin diangkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Henggar Budi Anggoro dilantik menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, Boedyo Dharmawan menjadi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Muhamad Masrofi menjadi Kepala Dinas Kependidikan, Olahraga, dan Pariwisata.

Sementara itu Arief Jatmiko dilantik menjadi Kepala Dinas Perhubungan, Agung Hariyadi menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Juli Emmylia menjadi Kepala Dinas

Perindustrian dan Perdagangan, Defranisco Dasilva Tavares diangkat menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Supriyanto menjadi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Endi Faiz Effendi menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Kemudian Ema Rachmawati dilantik menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Rahma Nur Hayati menjadi Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Zulfachmi Wahab menjadi Direktur RSUD Dr Moewardi Solo, Heri Dwi Purnomo diangkat menjadi Direktur RSUD Margono Soekarno, Agus Prasutio diangkat menjadi Kepala Biro Perkeonomian, Agus Sugiharto diangkat menjadi Kepala ESDM, dan Raden Rara Utami Rahajeng diangkat menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah.(ekd-34)

Title	Gubernur: Jabatan, No Titip No Jastip!		
Media	Jateng Pos	Reporter	Jan
Date	2025-05-08	Tone	Positive
Page	12	PR Value	



NO TITIP: Gubernur Jateng Ahmad Luthfi melantik 29 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama provinsi Jateng, Rabu, 7 Mei 2025.

HUMASJATENGPOS

Gubernur: Jabatan, No Titip No Jastip!

Lantik 29 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melantik 29 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ia menegaskan jabatan adalah amanah yang diemban diri sendiri sehingga tidak ada istilah "No Titip-titip No Jastip" atau diperjualbelikan.

"No titip-titip, no jastip. Jadi slogan itu tidak hanya untuk adik-adik SMA (pada penerimaan siswa baru). Tapi semua jabatan no titip-titip no jastip. Jelas semua," kata Ahmad Luthfi membuka sambutan dan arahan dalam pelantikan pejabat



AHMAD LUTHFI
(Gubernur Jateng)

diperjualbelikan.
"Karenanya sistemnya merita maka No Titip Titip No Jastip. Ora oleh titip ora oleh jasa penitipan, ora titip bayar, ora titip, ora usah kasih-kasih dan tidak diperjualbelikan karena jabatan itu amanah," jelasnya.

Lebih lanjut, pelantikan pimpinan tinggi pratama tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan beberapa jabatan kepala dinas dan mutasi beberapa pengangguran. "Saya mendorong agar pengangguran dan menyehatkan organisasi."

"Di tempat kita tidak perlu ada seleksi, kita cukup dengan menggunakan management talent, di mana rule-nya dengan cara sistem merit," katanya.

Secara umum terkait belanja

kepegawaiannya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah berjalan bagus dan sesuai aturan. Di mana batas yang ditentukan maksimal 30% telah tercapai. "Ketemuannya sudah sangat profesional."

"Hari ini saya yakin dan percaya dengan jabatan haru yang diberikan oleh para pimpinan tinggi pratama itu nanti akan menambah akseptasi pelayanan publik di tempat kita," jelasnya.

Dalam kesempatannya, Luthfi juga mengingatkan bahwa beberapa hal penting. Terutama terkait loyalitas dan integritas. Ia juga memekarkan bahwa tidak boleh ada ego sektoral di mana satu dinas merasa paling penting. Semua kerja sama karena dalam organisasi yang paling penting adalah kebersamaan.

"Organisasi ini barat kapal. Kalau tidak ada loyalitas maka nanti akan jadi rebutan, ora kompak, jadinya nanti tembak cucukan karena jadi tembus tu harus kita hindari," tegurnya.

Adapun dalam acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen dan Sekda Jateng Sumarno. Juga untuk pertama kalinya dalam pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Ketua Komunitas Nelayan Tani Nelayan Provinsi Jawa Tengah, Ketua Himpuan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Komunitas Sahabat Difabel, dan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Tengah.

(*/jan)

Title	38 Bhikkhu Thudong Mampir Ke Kantor Gubernur		
Media	Suara Merdeka	Reporter	H32-23
Date	2025-05-08	Tone	Positive
Page	9	PR Value	



SM/otsokumas Pemprov Jateng

DISAMBUT HANGAT: Sebanyak 38 Bhikkhu Thudong mengunjungi Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (7/5). Mereka disambut hangat oleh Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.(23)

38 Bhikkhu Thudong Mampir ke Kantor Gubernur

Bawa Pesan Perdamaian untuk Dunia

SEMARANG - Sebanyak 38 Bhikkhu Thudong kunjungi kantor Gubernur Jawa Tengah, di Jalan Pahlawan, Semarang, Rabu (7/5).

Para Bhikkhu Thudong itu telah melakukan perjalanan jauh mulai dari Thailand, Malaysia, Singapura, dan kemudian ke Indonesia.

Perjalanan Bhikkhu Thudong ini merupakan rangkaian peringatan Hari Raya Waisak 2569 BE/2025 M yang dipusatkan di Candi Borobudur.

Kehadiran mereka disambut langsung Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.

"Hari ini saya atas nama Gubernur Jawa Tengah dan seluruh masyarakat Jawa Tengah mengucap-

kan selamat datang kepada rombongan Bhikkhu dari Thailand," kata Ahmad Luthfi saat menyambut para Bhikkhu Thudong.

Ahmad Luthfi mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk toleransi beragama yang sangat kental sekali.

Terbukti para Bhikkhu Thudong ini dikawal kawan-kawan umat muslim dan nasrani secara bersama-sama.

Bentuk Keragaman

Bahkan dari Keraton Kasepuhan Cirebon yang notabene kerajaan

Islam pun ikut mengawal.

"Inilah bentuk keragaman dari kegiatan ini yang harus kita tumbuh kembangkan di wilayah Jawa Tengah sebagai unsur toleransi umat beragama yang kental di wilayah kita," ungkapnya.

Ketua Umum Internasional Thudong, Welly Widadi, berteima kasih atas sambutan hangat dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Kegiatan Thudong ini bukan sekadar berjalan tanpa maksud, selain ibadah juga ikut mendoakan warga Indonesia.

Terutama warga yang ditemui di sepanjang perjalanan para Bhikkhu Thudong. "Para Bhikkhu Thudong ini sudah berjalan beribu-ribu kilometer, membawa pesan perdamaian untuk dunia karena kami tahu toleransi di dunia ini atau di Indonesia ini sangat

penting sekali," kata Ahmad Luthfi.

Salah seorang Bhikkhu Thudong, Bhante Wichai, menyampaikan, terima kasih atas sambutan dan dukungan kepada para Bhikkhu Thudong.

Ini bukan kali pertama ia ikut Thudong dan setiap sampai di Java Tengah selalu mendapatkan sambutan hangat, termasuk dari teman-teman muslim. "Kami senang bisa kembali ke sini agar bisa hidup bersama di dunia ini. Kita harap semua bisa happy," ujar Bhante Wichai.

Sehari sebelumnya 38 Bhikkhu Thudong berkunjung ke Kelenteng Tay Kak Sie dan beristirahat di kawasan Gang Lombok Semarang.

Mereka pun menyempatkan diri mengunjungi Masjid Agung Kauman Semarang.

Setelah dari kantor Gubernur Jawa Tengah 38 Bhikkhu Thudong

akan melanjutkan perjalanan dan singgah di Vihara Gunung Kalong Ungaran, Kabupaten Semarang.

Dalam perjalannya menuju Ungaran ini, para bhiksu disambut warga di setiap jalan yang dilalui.

Dimulai dari perbatasan Kabupaten Semarang dan Kota Semarang, rombongan disambut barongsai. Kemudian jalan-jalan raya maupun jalan kampung, penuh sesak warga yang menyaksikan bahkan tak sedikit yang mengulurkan minumannya. Para bhiksu sendiri tidak berkarat-karat, hanya melambangkan lambakan tangan disertai senyuman.

Adapun di Vihara Gunung Kalong juga ada sambutan meriah baik dari Umat Budha, masyarakat, dan Forkopimda termasuk Bupati Semarang Ngesti Nugraha. Para bhiksu ini menjalani ribuan cuci kaki sebelum beristirahat di Vihara itu.

Bupati Semarang Ngesti Nugraha menyambut baik para rombongan bhiksu ini. Menurutnya, ini sudah kali ketiga, rombongan pejalan kaki singgah di Kabupaten Semarang. Karena setiap tahun, perjalanan ribuan seperti ini selalu memilih Kabupaten Semarang untuk tempat menginap.

Ngesti juga berharap kepada para bhiksu ini mendekati warga dan pimpinan daerah di Kabupaten Semarang tetap guyub rukun ayam tenteram seperti yang sudah dipelihara selama ini. Selain itu masyarakat semakin sejahtera dan maju.

Ketua Yayasan Vihara Ungaran Tjoa Lie mengatakan, para Banthe (bhiksu) selalu memilih Kabupaten Semarang untuk menginap setiap perjalanan menuju Candi Borobudur. Ini karena tingkat toleransi di wilayah ini cukup tinggi. (H32-23)

Title	Bhikku Thudong Bawa Misi Toleransi Umat		
Media	Jateng Pos	Reporter	ucl/muz
Date	2025-05-08	Tone	Positive
Page	1	PR Value	



FOTO : DWI SAMBODO/JATENGPOS

JALAN PANJANG: Para Bhikku Thudong saat meninggalkan kantor Gubernur Jateng di Jalan Pahlawan Semarang menuju Candi Borobudur Magelang, Rabu (7/5).

Bhikku Thudong Bawa Misi Toleransi Umat

SEMARANG- Sebanyak 38 Bhikkhu Thudong menyempatkan diri singgah di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (7/5). Kehadiran mereka dalam perjalanan menuju Candi Borobudur Magelang disambut langsung Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.

"Sya atas nama Gubernur Jateng dan selu-

ruh masyarakat Jateng mengucapkan selamat datang kepada rombongan Bhikkhu dari Thailand," kata Ahmad Luthfi saat menyambut para Bhikkhu Thudong.

Para Bhikkhu Thudong itu telah melakukan perjalanan jauh mulai dari Thailand, Malaysia,

■ BACA BHIKKU...HAL 11

Bhikku

dari hal 1

Singapura, dan kemudian ke Indonesia. Saat ini rombongan Bhikkhu Thudong sudah sampai di Jateng. Thudong ini merupakan rangkaian peringatan Hari Raya Waisak 2569 BE/2025 M.

"Thudong ini artinya perjalanan. Thudong ini sangat panjang sekali dalam rangka ritual pada puncaknya 12 Mei besok di Borobudur. Provinsi Jateng tidak hanya mendukung tetapi juga mengawal kegiatan dan prosesi yang dilakukan," kata Gubernur.

Ahmad Luthfi mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk toleransi beragama yang sangat kental sekali. Terbukti para Bhikkhu Thudong ini dikawal kawan-kawan umat muslim dan nasrani secara bersama-sama. Bahkan dari Keraton Kasepuhan Cirebon yang notabene kerajaan Islam pun ikut mengawal.

"Inilah bentuk keragaman dari kegiatan ini yang harus kita tumbuh kembangkan di wilayah Jawa Tengah sebagai unsur toleransi umat beragama yang kental di wilayah kita," ungkapnya.

Ahmad Luthfi sendiri sebelum menjabat sebagai Gubernur Jateng sudah beberapa kali menyambut para Bhikkhu Thudong. Saat itu, Ahmad Luthfi masih menjabat sebagai Kapolda Jateng.

"Kalau jadi Gubernur kan

baru, tapi waktu saya jadi Kapolda sudah beberapa kali menerima Bhikkhu Thudong Tudong. Kalau tidak salah sudah empat kali. Bahkan saya ikut mengawal waktu itu," ujar Ahmad Luthfi.

Langsung Gubernur, bahwa para Bhikkhu Thudong ini sudah berjalan beribu-ribu kilometer, membawa pesan perdamaian dan toleransi untuk dunia.

Ketua Umum Internasional Thudong, Welly Widadi, berterima kasih atas sambutan hangat dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng.

Kegiatan Thudong ini bukan sekadar berjalan tanpa maksud, selain ibadah juga ikut mendoakan warga Indonesia. Terutama warga yang ditemui sepanjang perjalanan para Bhikkhu Tudong.

Salah seorang Bhikkhu Thudong, Bhante Wichai, menyampaikan, terima kasih atas sambutan dan dukungan kepada para Bhikkhu Thudong. Ini bukan pertama kali ia ikut Thudong dan setiap sampai di Jateng selalu mendapatkan sambutan hangat, termasuk dari teman-teman muslim.

"Terima kasih kepada Gubernur dan seluruh pihak yang mendukung kami. Kami senang bisa kembali ke sini agar bisa hidup bersama di dunia ini. Kita harap semua bisa happy," ujar Bhante Wichai.

(ucl/muz)

Title	Tutup Semua Lubang Pungutan di SMA/SMK		
Media	Suara Merdeka	Reporter	
Date	2025-05-08	Tone	Positive
Page	4	PR Value	

Tutup Semua Lubang Pungutan di SMA/SMK

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan tak ada lagi pungutan untuk siswa SMA/SMK. Penegasan ini dia sampaikan dalam dialog terkait masalah pendidikan yang digelar di Rumah Rakyat Kantor Gubernur Jateng, Senin (5/5). Bagi para orang tua, khususnya yang memiliki anak bersekolah di SMA/SMK di seluruh provinsi ini, hal itu adalah kabar gembira dan melegakan. Kita berharap ketegasan orang nomor satu di Jateng ini bisa dipegang dan menjadi pegangan para orang tua, juga pihak sekolah.

Dalam Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 yang dikutip Luthfi antara lain memang melarang komite sekolah menarik pungutan atau meminta pembiayaan dari orang tua murid. Komite sekolah hanya boleh menerima sumbangan sukarela untuk mendukung kegiatan pendidikan. Luthfi tegas menyatakan, apabila masih ada sekolah yang meminta atau menarik biaya atau pungutan kepada orang tua/wali murid segera dilaporkan untuk ditindaklanjuti.

Apa yang disampaikan Luthfi tersebut sebenarnya bukan hal baru. Larangan menarik pungutan kepada orang tua siswa SMA/SMK negeri sudah didengungkan oleh banyak pihak. Tetapi, realita di lapangan berbeda. Kita masih kerap mendengar adanya tarikan atau pungutan untuk beragam kegiatan yang dilakukan komite sekolah. Keberadaan dana BOS dan sejenis seakan diabaikan. SPP boleh jadi sudah tak lagi ada, namun pungutan lain kerap kali lebih besar nominalnya.

Sejak ada program BOS baik nasional maupun daerah, harapan para orang tua ketika menyekolahkan anaknya di sekolah negeri akan terbebas segala macam pungutan. Apalagi, digembarkan bahwa anggaran pendidikan 20 persen dari APBN. Namun harapan itu hanya sekadar harapan. Pasalnya, itu tadi, pungutan dengan berbagai macam peruntukan masih ada. Hal inilah yang membuat banyak orang tua tak begitu peduli pada penegasan seperti yang disampaikan Luthfi tersebut.

Penegasan Luthfi itu di samping bukan hal baru, tetapi saja ada peluang bagi sekolah atau komite sekolah untuk menarik pungutan, yakni diperbolehkannya menerima sumbangan secara sukarela. Dengan kata lain, pungutan paksa dilarang, tetapi sumbangan sukarela dipersilakan. Ini seperti jebakan Batman bagi para wali murid. Karena biasanya yang bernama sukarela itu tetap ada nominalnya, dan mengena kepada tiap wali murid yang kadang tak bisa menghindarinya.

Menilik anggaran pendidikan yang begitu besar, dan adanya Permendibud terbaru itu, seharusnya Gubernur Jateng Ahmad Luthfi bisa lebih tegas lagi melarang segala macam pungutan di SMA/SMK. Tutup lubang-lubang yang masih memungkin untuk dijadikan oknum tertentu untuk menarik pungutan, apa pun namanya. Bahwa pendidikan itu *jer besuki mawa beya* adalah benar, tetapi menjadikan semua kegiatan pendidikan butuh biaya sungguh sangat membebani para orang tua.

Title	Lawan dan Sikat Habis Praktik Premanisme		
Media	Suara Merdeka	Reporter	
Date	2025-05-08	Tone	Positive
Page	4	PR Value	

Lawan dan Sikat Habis Praktik Premanisme

Langkah pemberantasan premanisme oleh Polri layak mendapat apresiasi besar. Menindak tegas segala bentuk premanisme menjadi tugas dan kewajiban Polri. Perilaku premanisme yang merujuk tindak pidana kekerasan sangat mereksahkan publik. Laku kejahatan hanya akan merusak kenyamanan, keamanan, dan ketenangan. Ketika warga terusik oleh perilaku kejahatan dan kekerasan, Polri perlu harus turun tangan dan menindak tegas pelaku.

Belakangan ini tindak premanisme mudah ditemui di tengah masyarakat. Mereka mencelakai orang lain, baik secara materi maupun fisik, di kalangan pengusaha besar maupun rakyat kecil. Memungut upeti kepada investor yang tengah menjalankan usaha tak bisa diberantas. Bahkan sopir truk diancam sekelompok preman saat tidak bersedia memberi uang ketika melintas wilayah kekuasaan. Setelah kejadian itu viral, barulah kelompok itu ditindak.

Terakhir yang menjadi perhatian luas adanya seorang sosok yang dikenal memiliki ormas, menghina tokoh yang menjadi simbol negara. Ucapannya tersebut memicu kontroversi dan keributan yang dikhawatirkan menyulut emosi berbagai pihak. Apalagi isu tersebut dimanfaatkan di media sosial dengan kemasan judul yang bombastis. Masyarakat awam yang tidak memiliki pemahaman literasi media digital secara baik akan mudah terpapar oleh isu dan merespons dengan sikap negatif.

Jadi rahasia umum praktik premanisme juga berlangsung di sektor jasa transportasi umum seperti lingkungan pelabuhan. Tanpa ada upeti ke kelompok "penguasa" wilayah, jangan berharap usaha bisa berjalan lancar. Alih-alih mendapat untung, pengusaha transportasi malah tak bisa menjalani roda bisnisnya. Buntung usahanya. Gangguan preman selalu saja terjadi. Alhasil, pengusaha memilih untuk memberikan upeti asalkan roda bisnis bisa berputar.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi juga pernah menegaskan saat pertemuan dengan pengusaha di Jakarta, 15 April 2025. Ia menegaskan, investor silakan masuk ke Jateng. Mantan Kapolda Jateng itu menjamin keamanan investor karena ia menolak tegas praktik premanisme. Maka, ketika Mabes Polri mengeluarkan kebijakan memberantas praktik premanisme, ini menjadi kekuatan bagi semua pihak. Yang diperlukan adalah model penindakannya.

Kita mengenal penembakan misterius pada 1983. Aparat menghabisi orang-orang yang dianggap pembuat onar tanpa melalui proses hukum. Ini sama halnya memberantas premanisme dengan cara premanisme pula. Bangsa ini adalah negara hukum, setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum. Penegakan hukum menjadi jawaban atas praktik premanisme. Negara tak boleh kalah oleh kelompok yang terang-terangan melanggar hukum.

Title	Perlu Dikaji, Usulan Pembentukan Provinsi Jawa Selatan		
Media	Jateng Pos	Reporter	ant/muz
Date	2025-05-08	Tone	Positive
Page	7	PR Value	

Perlu Dikaji, Usulan Pembentukan Provinsi Jawa Selatan

PURWOKERTO- Pakar kebijakan publik Universitas Jendral Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Slamet Rosyadi menilai perlu adanya kajian terkait dengan usulan pembentukan provinsi baru di wilayah Jawa Tengah bagian selatan (Jasela), yang sempat diusulkan dengan sebutan Lateng Selatan atau Jawa Selatan.

"Usulan pembentukan provinsi daerah khusus penyanga pangan di wilayah Jasela itu ide yang mungkin, tapi belum ada kajian," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu (7/5).

Ia mengatakan kajian tersebut untuk mengetahui apakah betul wilayah Jasela layak untuk dijadikan sebagai provinsi daerah khusus penyanga pangan.

Menurut dia, usulan tersebut harus mempunyai logika yang kuat, bukan sekadar bahasa politis

yang disampaikan oleh seorang politikus ataupun tokoh daerah.

"Pada dasarnya, kita akan aplikasi banyak hal-hal misalkan dilakukan pembenahan provinsi baru. Tapi paling tidak ini akan memberikan beban berat dalam hal pendanaan (pada pemerintah provinsi induk sebelum daerah otonomi baru itu bisa mandiri)," katanya.

Ia mengatakan alangkah baiknya jika berbagai potensi yang ada di wilayah Jasela itu dioptimalkan dengan pengembangan kawasan tanpa harus membentuk daerah otonomi baru.

Dalam hal ini, kata dia, kawasan tersebut dikembangkan di salah satu wilayah provinsi itu, misalnya sebagai penyanga pangan.

"Mungkin itu sifatnya pada fungsiya saja ya, ada pengiatuan dari pusat. Misalkan di salah satu ka-



Pakar kebijakan publik Unsoed Purwokerto Prof Slamet Rosyadi.

seharsunya berperan aktif dalam meningkatkan pembangunan di wilayah Jateng agar tidak tertinggal terlalu jauh dari wilayah utara.

Gubernur harus diungkapkan bahwa daerah-daerah yang tertinggal harus mendapatkan perhatian agar tidak ada ketimpangan dengan daerah lain," kata Slamet, dilansir dari Antara.

Usulan pembentukan provinsi baru di wilayah Jasela sebagai daerah khusus penyanga pangan itu disampaikan oleh anggota DPR RI Abdul Kholid yang selama ini menyuarakan pemerataan pembangunan agar tidak ada ketimpangan antara Jateng bagian utara dan selatan Jateng.

Lebih lanjut, dia mengatakan bupati di wilayah Jateng Selatan itu diberikan perhatian yang besar untuk bisa menjadi daerah penyanga pangan, saya kira itu yang rasional," katanya menjelaskan.

Menurut dia, Gubernur Jateng

Jateng selama lima tahun sebagai senada periode 2019-2024, dikenal sebagai daerah yang masih belum terhubung aksesnya untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, penanganan kemiskinan, pengembangan potensi daerah, dan permasalahan regional.

Oleh karena itu, kata dia, opsi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut berupa pengembangan simpul kawasan utara, selatan, dan timur secara lebih merata.

"Kita lihat di wilayah ini, sayangnya buktinya adalah Jasela, Jateng Selatan atau Jawa Selatan, ini membutuhkan skema khusus untuk dikembangkan. Idealnya memang harus menjadi provinsi, tapi jalurnya adalah dengan jalur menjadi daerah khusus penyanga pangan nasional," kata Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI itu. (ant/muz)